

# PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Disampaikan pada acara:  
RAPAT KOORDINASI P3DN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI  
19 Maret 2022

## UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

### Pasal 86

- (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:
- lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
  - badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

setiap pengadaan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, serta pekerjaannya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, maka **WAJIB** menggunakan produk dalam negeri.

## UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Pasal 97

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit **40% (empat puluh persen)** produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

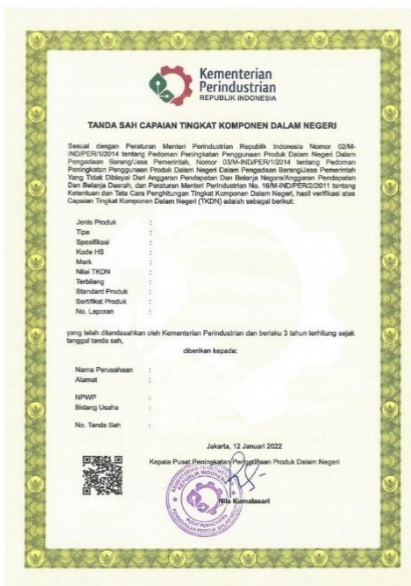
**PRODUK DALAM NEGERI (PDN)\*** adalah Barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang:

**1** Diproduksi atau dikerjakan oleh **perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi** di Indonesia

**2** Menggunakan seluruh atau sebagian **tenaga kerja warga negara Indonesia**

**3** Prosesnya menggunakan **Bahan Baku atau komponen** yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri

\*) sesuai Pasal 1 Ayat 21 PP No 29 Tahun 2018



Kewajiban penggunaan PDN sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) (pasal 87 Ayat 1 UU No 3 Tahun 2014).

**Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, atau Gabungan Barang dan Jasa.

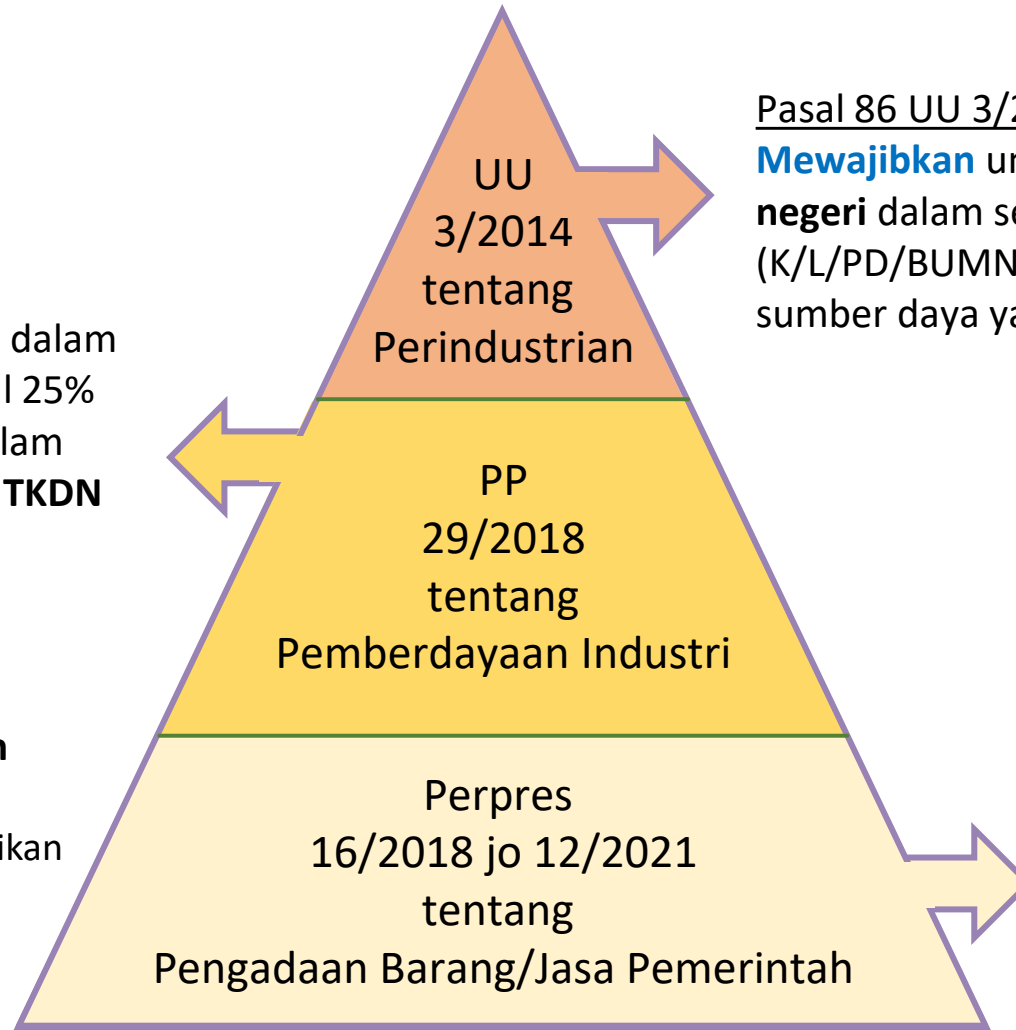
Pasal 61 PP 29/2018:

**Kewajiban** menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah **terdapat** produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai **TKDN dan BMP paling sedikit 40%**



## Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.  
(Pasal 1 PP 29/2018)



Pasal 86 UU 3/2014:

**Mewajibkan** untuk menggunakan **produk dalam negeri** dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara)

Pasal 66 Perpres 12/2021:

**Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib** menggunakan produk dalam negeri

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait



Perdagangan kita harus meningkatkan **TKDN**. Ini selalu saya ulang komponen dalam negeri, komponen dalam negeri, komponen dalam negeri. Produk dalam negeri, produk dalam negeri, produk dalam negeri.”

*Pidato Presiden RI Joko Widodo  
saat membuka Raker Kementerian Perdagangan di Istana Negara,  
Kamis (4/3/2021)*

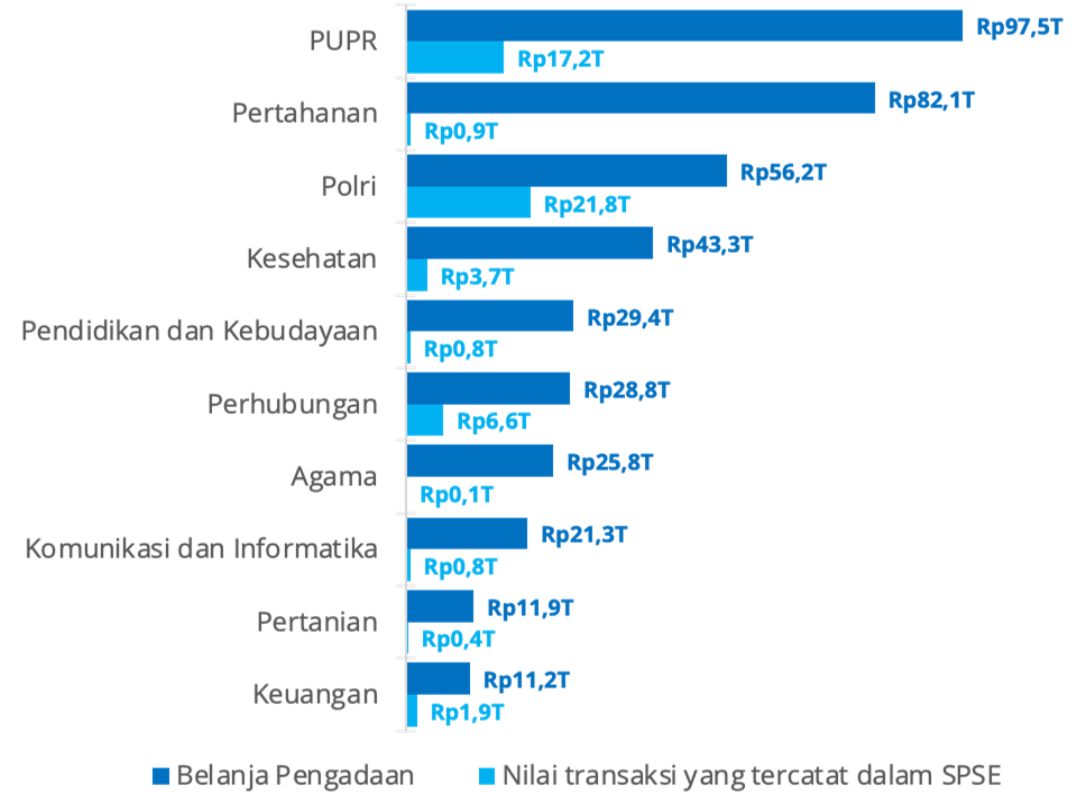


Perintah Presiden target belanja PDN dan  
UMKM Tahun 2022 sebanyak **Rp400 Triliun**

# ALOKASI 10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR

No	K/L	Pagu Anggaran PBJ (Rp)	Alokasi untuk PDN (Rp)	Persentase
1	PUPR	97,5 Triliun	82,8 Triliun**	84,92%*
2	Pertahanan	82,1 Triliun	10,0 Triliun*	12,18%*
3	Polri	56,2 Triliun	32,5 Triliun	57,83%
4	Kesehatan	36,5 Triliun	28,0 Triliun*	76,71%*
5	Dikbud Ristek	29,4 Triliun	10,5 Triliun*	35,71%
6	Perhubungan	28,8 Triliun	20,1 Triliun	69,79%
7	Agama	25,8 Triliun	19,70 Triliun	76,24%
8	Kominfo	21,3 Triliun	6,7 Triliun*	31,4%*
9	Pertanian	11,9 Triliun	3,2 Triliun	26,89%
10	Keuangan	11,2 Triliun	7,8 Triliun*	70,27%*
<b>Total</b>		<b>407,5 Triliun</b>	<b>187,9 Triliun*</b>	<b>46,1%*</b>

Alokasi anggaran belanja PDN berbanding dengan Pagu Anggaran PBJ dari 10 K/L dengan anggaran terbesar tahun 2022  
Sumber: LKPP (2022)



Anggaran belanja 10 K/L dengan anggaran tertinggi pada 2022 dan nilai transaksi yang tercatat dalam SPSE (per 1 Maret 2022)  
Sumber: LKPP (2022)

Tiap K/L agar mengalokasikan minimal **40 - 85%** dari anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri sehingga dapat mencapai target afirmasi sebesar minimal Rp 200 Triliun oleh Pemerintah Pusat pada 2022.

\*data disampaikan secara tertulis, \*\*data sementara

PDB	Tahun	
	Simulasi 1	Simulasi 2
(1)	(2)	(3)
Shock (Konsumsi Impor Pemerintah, Triliun Rupiah)	400,00	400,00
Dampak Output (Triliun Rupiah)	627,58	627,58
Dampak NTB ADHB (Triliun Rupiah)	307,65	307,65
PDB 2021 ADHB (Triliun Rupiah)	16.970,79	16.970,79
<b>Pertumbuhan Dampak (%)</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>
PDB 2021 ADHK (Triliun Rupiah)	11.118,87	11.118,87
Indeks Implisit	161,8	165,83
Dampak NTB ADHK (Triliun Rupiah)	190,13	185,51
<b>Pertumbuhan Konstan (%)</b>	<b>1,71</b>	<b>1,67</b>

Berdasarkan Hasil Simulasi BPS, Pembelian PDN senilai Rp 400 T meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar **1,67 - 1,71%**.

Jadi, jika pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar **3,69%**, maka dengan penggunaan PDN, ekonomi Indonesia bisa naik hingga **5,36 – 5,4%**.



# PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

FILTER

Usaha Kecil Menengah (UKM)

Category

AllCategory

Amphibious Excavator Long Arm 10

Amphibious Excavator Mini Long Arm 18

Excavator Long Arm 9

Excavator Standard Mini 15

Weed Harvester 5

Product Name

Product Name

Product Type

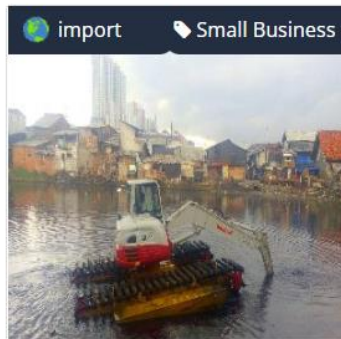
Select All

Vendor

Select All

**UMKM menjual produk impor dan produk yang diproduksi oleh industri besar.**

Juga ditemukan di beberapa *marketplace* pemerintah lainnya



import Small Business  
**Ultratrex ULTRATREX Amphibious Excavator AX18...**

PT. ULTRATREX INDONESIA

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a



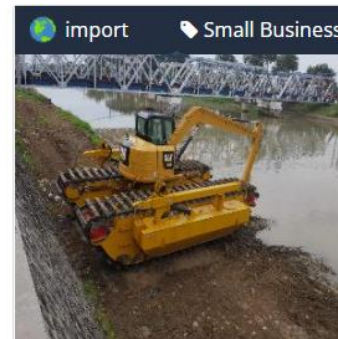
import Small Business  
**Ultratrex ULTRATREX Amphibious Excavator AX18...**

PT. ULTRATREX INDONESIA

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a



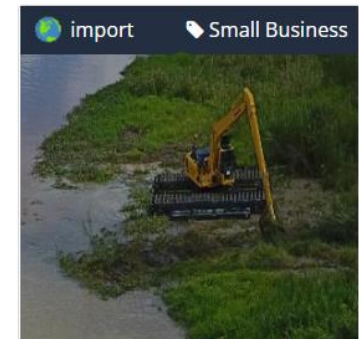
import Small Business  
**Ultratrex ULTRATREX Amphibious Excavator AX18...**

PT. ULTRATREX INDONESIA

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a



import Small Business  
**Ultratrex ULTRATREX Amphibious Excavator AX33...**

PT. ULTRATREX INDONESIA

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

## UMKM PRODUK IMPOR DI MARKETPLACE PEMERINTAH

The screenshots show the following details:

- PaDI - KBUMN:** Listing for 'Masker Kn95 Kf95 Mouson 5 Ply Embos Mouson Isi 50 Pcs Earloop Putih' with a yellow highlight.
- e-Order - Pemprov DKI Jakarta:** Listing for 'Masker KN-95' priced at 'Rp 10.000,00 / Box' with a yellow highlight.
- SIPLah - Kemendikbudristek:** Listing for 'Masker KN95' priced at 'Rp. 25,000' with a yellow highlight.

## PRODUK SEJENIS BER-TKDN KATEGORI WAJIB

**P3DN** DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

HOME   SERTIFIKAT   REKAPITULASI   FAQ   REGULASI   VIDEO

### Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Era Medika Alkesindo
No. Sertifikat	6285/SJ-IND.8/TKDN/7/2021
Tanggal	30 Juli 2021
Hasil Produksi	Industri Peralatan Kedokteran dan Gigi, Perlengkapan Orthopedic dan Prosthetic
Kode HS	63079040
No Referensi	PTKDN - 2101031 - 25132
Verifikator	PT. Sucofindo
Jenis Produk	: Masker
Merk dan Tipe	: Onehealth KN95
Spesifikasi	: 5 Ply
Standard	: -
Nilai TKDN	: 67.43%

Saat ini sedang berkolaborasi dengan beberapa marketplace pemerintah untuk memprioritaskan menayangkan produk ber-TKDN

**Suplai Masker Dalam Negeri telah melebihi kebutuhan nasional.**  
 Kapasitas Produksi 8,2 miliar pcs  
 Kebutuhan Nasional 3 miliar pcs → **UMKM menjual produk dalam negeri**



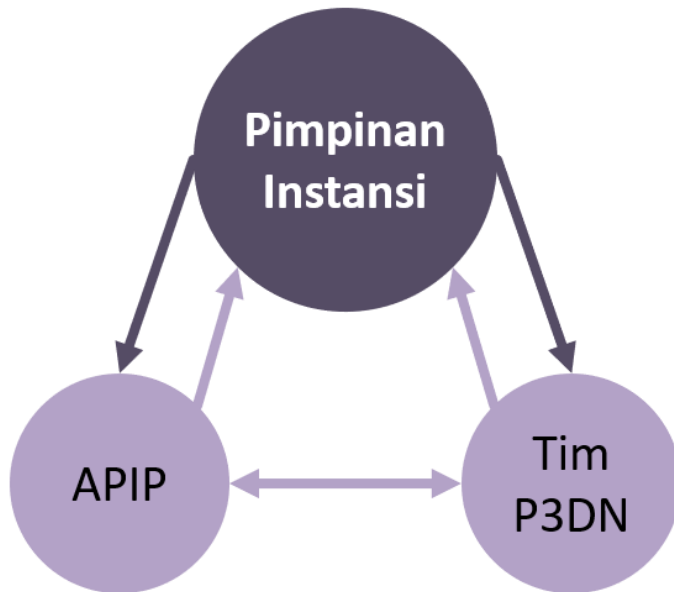
## PENGAWASAN

PP 29/2018  
Pasal 76

dilakukan oleh:  
**APIP, Pejabat Pengawas Internal, Tim P3DN**

Perpres 16/2018  
Pasal 76

dilakukan oleh:  
**Pimpinan instansi melalui APIP**



## SANKSI



**LEMBAGA VERIFIKASI**  
PP 29/2018 Pasal 106

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN



**PRODUSEN BARANG/ PENYEDIA JASA**  
PP 29/2018 Pasal 109-110

Sanksi yang diberikan:

- Pencabutan sertifikat TKDN
- Pencantuman dalam daftar hitam



**PEJABAT PENGADAAN**  
PP 29/2018 Pasal 107-108

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Denda administratif  
Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000
- Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa



**Denda administratif**

- Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
- 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor



# OPTIMALISASI PROGRAM P3DN DI LINGKUNGAN POLRI



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA



# AKSELERASI BELANJA PDN MELALUI PLATFORM SIP3DN

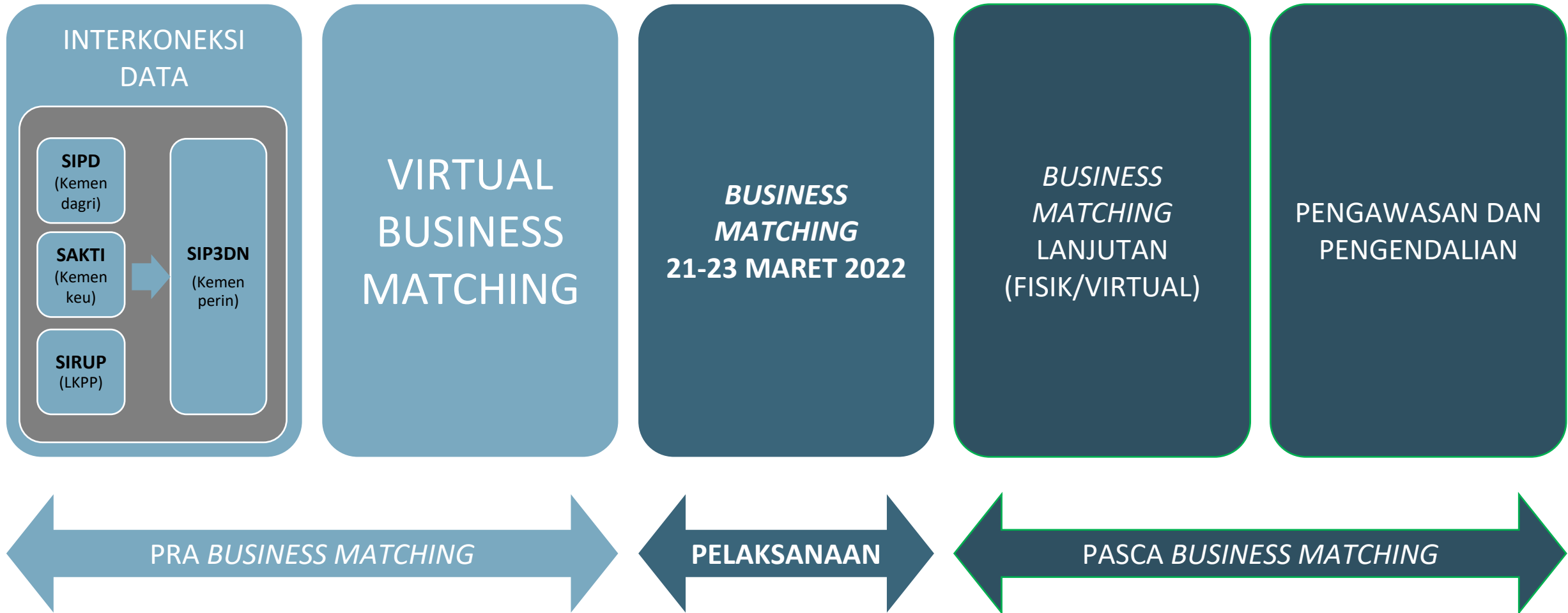


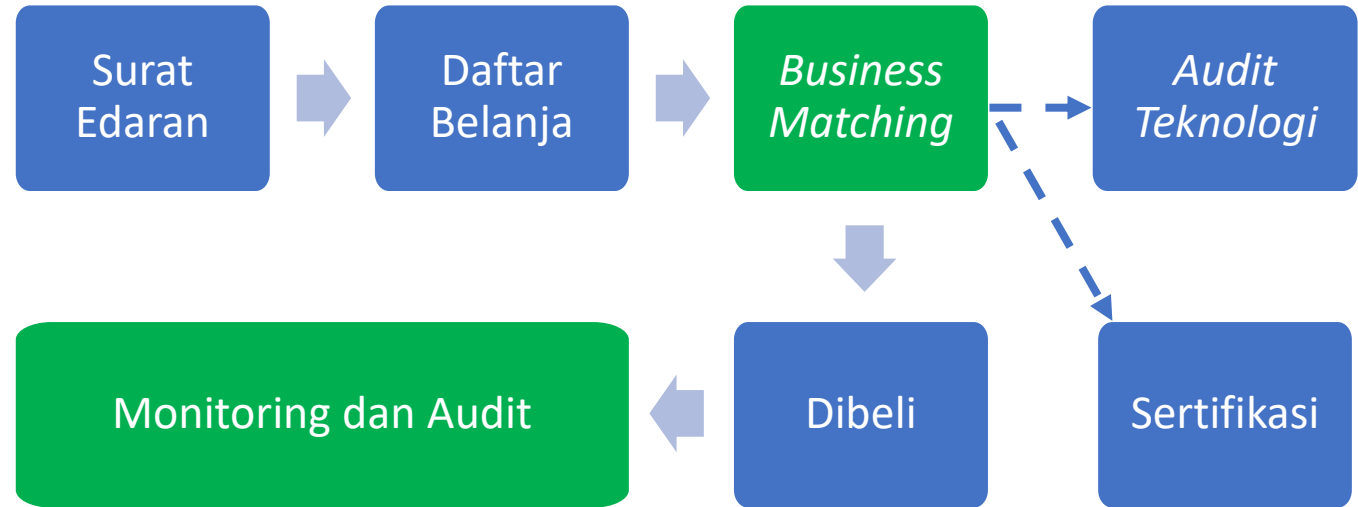
Untuk mendukung pelaksanaan Program P3DN, telah disiapkan:

- **Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri** (<http://tkdn.kemenperin.go.id>)
- **SIP3DN** (<http://p3dn.kemenperin.go.id/timnas>)
- **Laman Pengaduan P3DN/TKDN** (<http://p3dn.kemenperin.go.id/lapor>)



Telah dilakukan integrasi SIP3DN (Sistem Informasi P3DN) dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk interkoneksi **data anggaran** yang berpotensi belanja PDN





***Business Matching*** antara instansi pengguna dengan penyedia Produk Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian

**Waktu**

Senin – Rabu, 21 – 23 Maret 2022

**Lokasi**

Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali

**Tema**

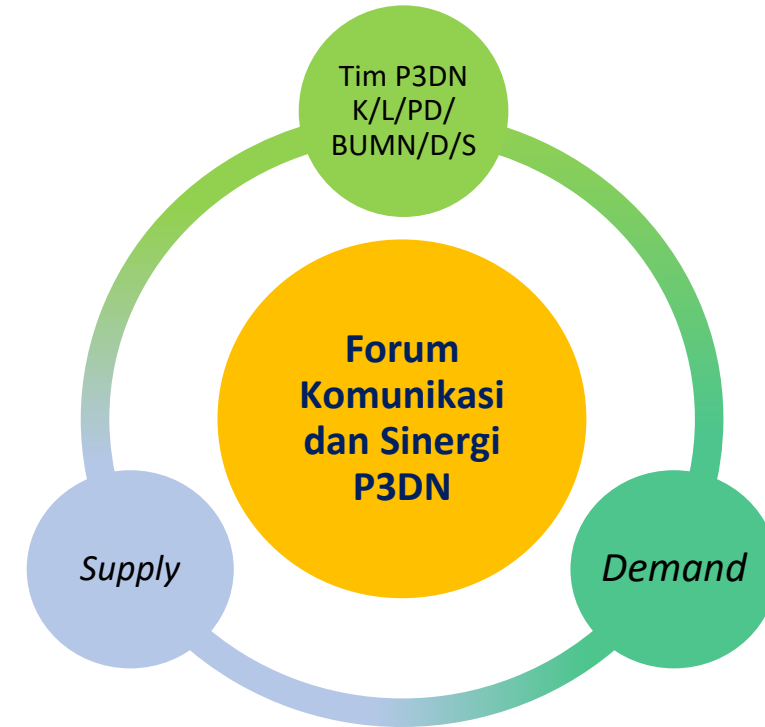
## **Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022**

**Peserta**

- 1.000 peserta** yang berasal dari,
- perwakilan Kementerian/Lembaga,
  - perwakilan Pemerintah Daerah, dan
  - perwakilan industri/UMKM/artisan
  - Perwakilan BUMN

Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah	BUMN/D/S
Sudah ada 11 dari 184 K/L yang memiliki Tim P3DN, yaitu: Kemenperin, Kementerian ESDM, Kemenkes, Kemendikbud Ristek, BPKP, BPPT, LKPP, PUPR*, Kemenhub*, Kemenkeu*, dan Kemendagri*	Sudah ada 59 provinsi dan kabupaten/kota yang sudah memiliki Tim P3DN. Selain itu, terdapat 34 provinsi dan kabupaten/kota yang sedang proses pembentukan Tim P3DN. Dan sebanyak 449 provinsi dan kabupaten/kota belum membentuk Tim P3DN.	Sudah ada 8 Badan Usaha yang memiliki Tim P3DN, yaitu: Telkom, Indofarma, PLN, Pertamina, PGN, Semen Indonesia, Surveyor Indonesia, MIND ID*

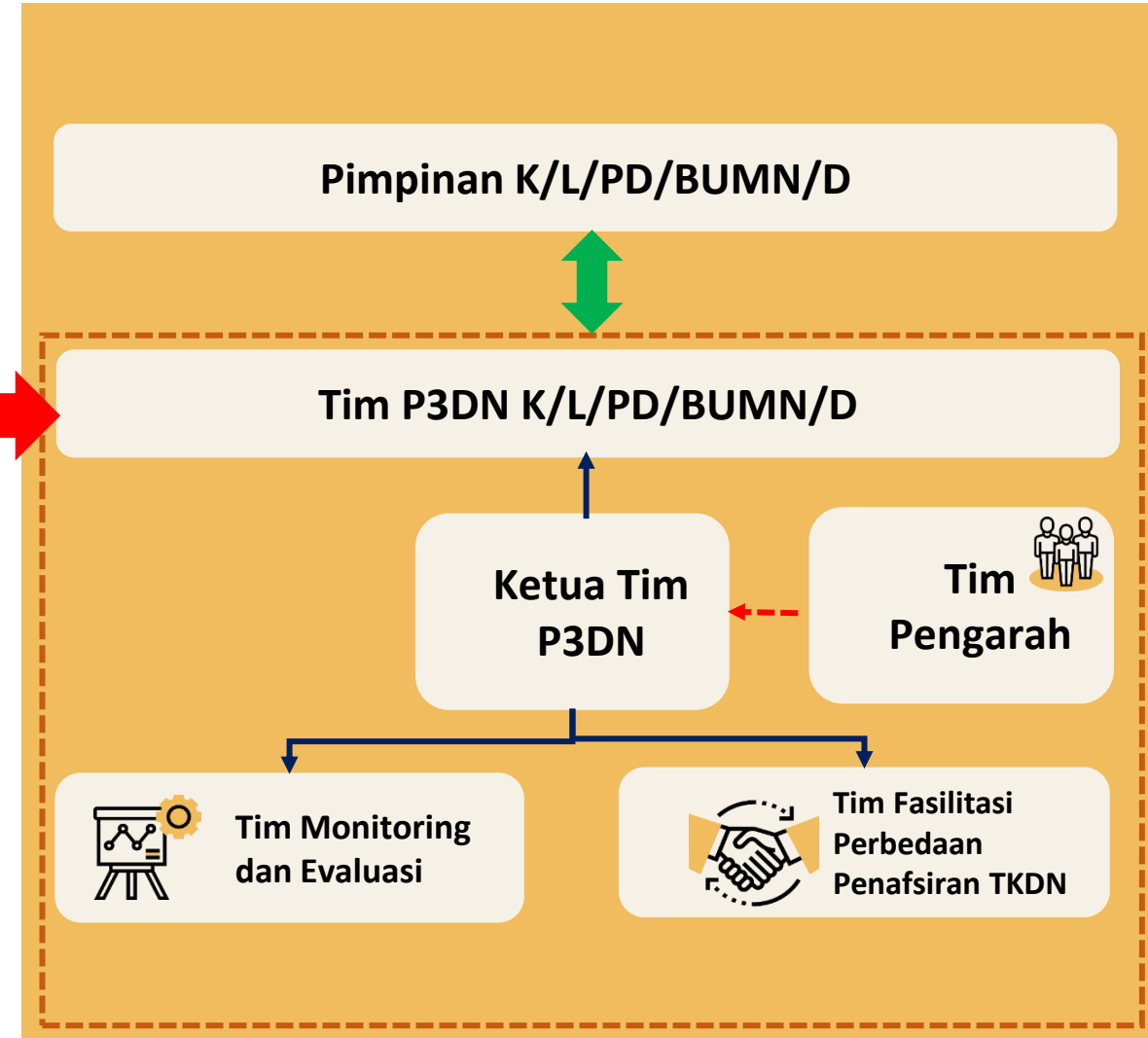
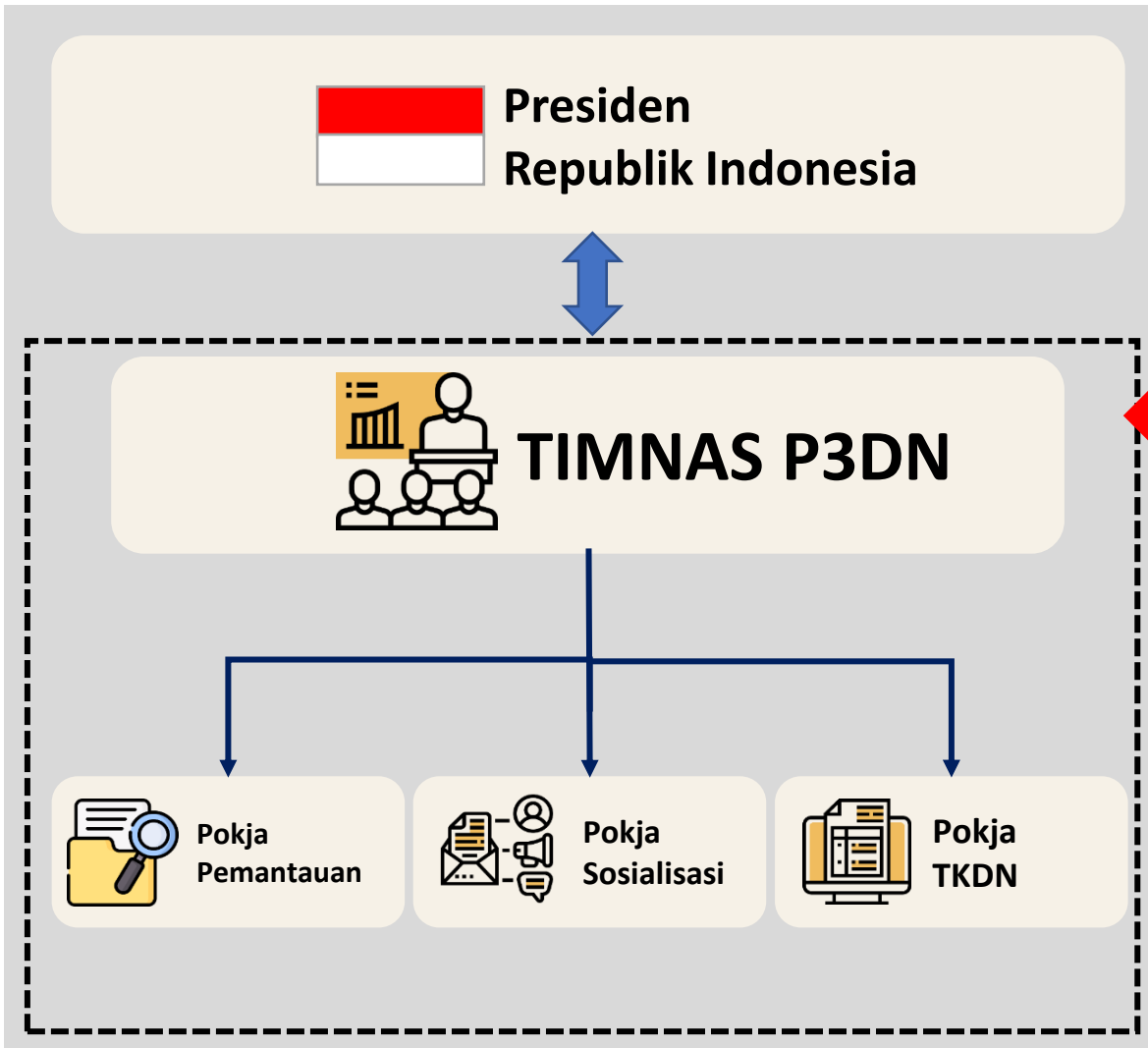
\*sedang dalam proses pembentukan



”Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, **dibentuk Tim P3DN** pada setiap **Pengguna Produk Dalam Negeri ...**”  
(PP 29/2018 Pasal 74)



# PEMBENTUKAN TIM P3DN K/L/PD/BUMN/D




## Tim Nasional P3DN

**Pokja  
Pemantauan**

**Pokja  
Sosialisasi**

**Pokja TKDN**


- 
1. Dibentuk berdasarkan Keppres 24 Tahun 2018
  2. Memiliki tugas utama
    - Melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan oleh K/L, PD, BUMN
    - Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri [Tim P3DN]

## Tim P3DN K/L, Pemda dan BUMN

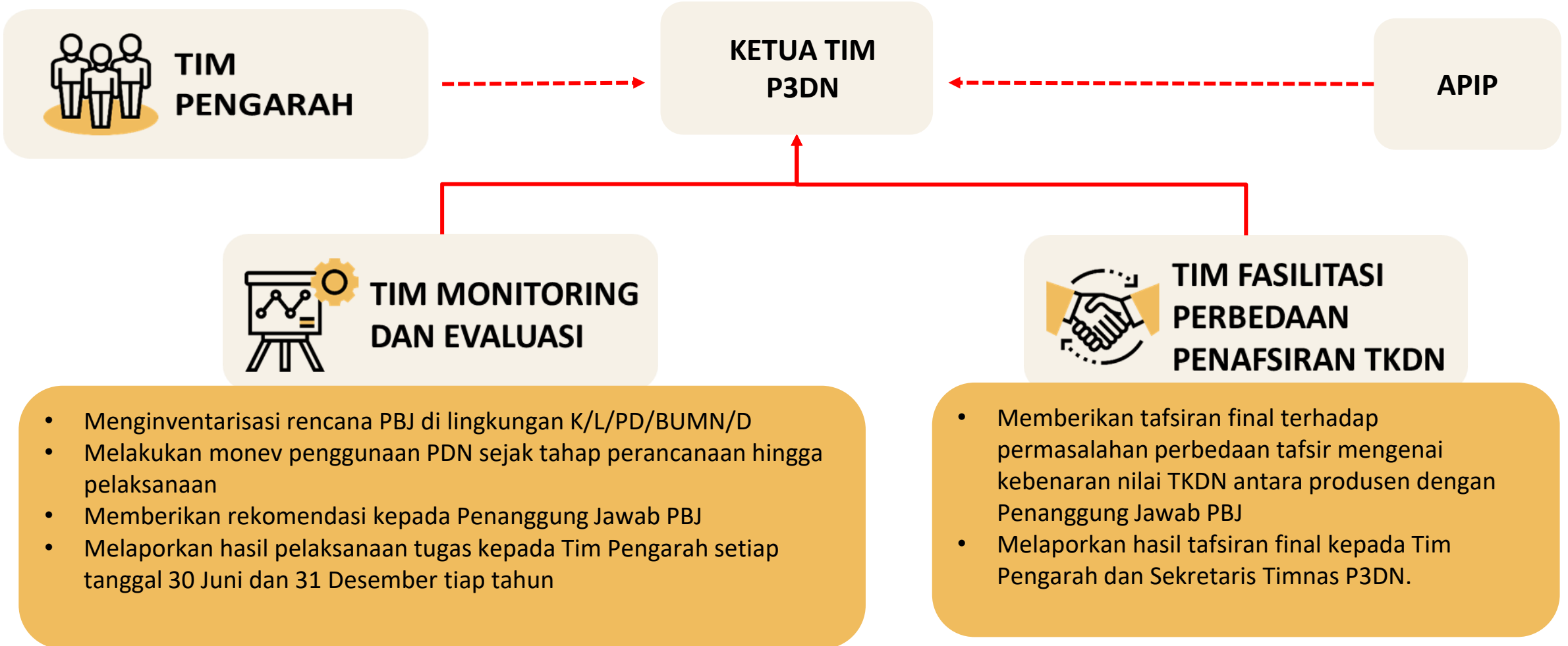
**Tim Pengarah**

**Tim Monev**

**Tim Fasilitasi  
Perbedaan  
Penafsiran TKDN**

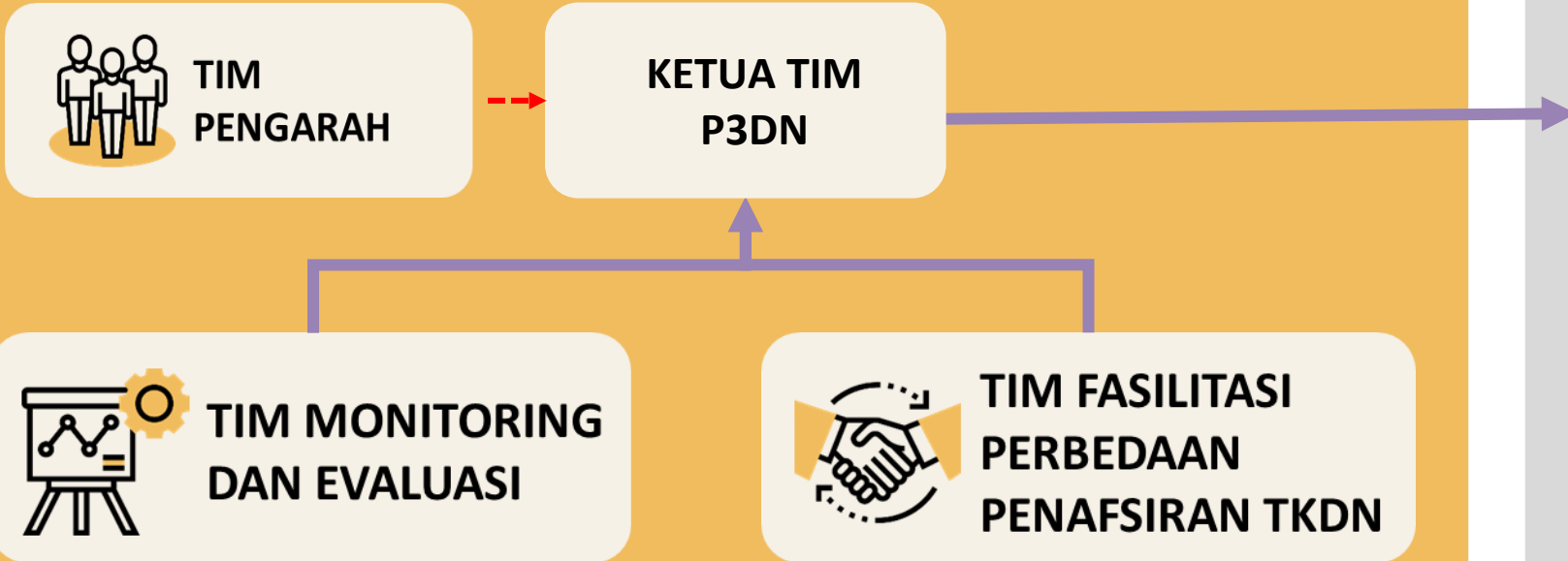
- 
1. Dasar pembentukannya adalah PP No 29 Tahun 2018 Pasal 74
  2. Memiliki tugas utama Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing

# PEMBENTUKAN TIM P3DN K/L/PD/BUMN/D



# ALUR PELAPORAN TIM P3DN

## Tim P3DN K/L/PD dan BUMN



Tim Monev akan menyusun laporan kepada Tim Pengarah setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya

## Tim Nasional P3DN



Ketua Harian Timnas P3DN akan menerima laporan pelaksanaan tugas Tim P3DN setiap awal tahun di bulan Januari



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEPUTUSAN ME

TIM PENINGKAT

DENG

MENTERI

Menimbang : a. be  
Pe  
Pe  
Pe  
Iir

I. Tim Pengarah

- a. Ketua : Sekretaris Jenderal.
- b. Anggota :
  1. Direktur Jenderal Industri Agro;
  2. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
  3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
  4. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
  5. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
  6. Inspektur Jenderal;
  7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
  8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
  9. Ir. Neil Iskandar Dauly, Staf Khusus Menteri Perindustrian;
  10. Febri Hendri Antoni Arif, S.T., Staf Khusus Menteri

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

### Tim Pengarah

- Dikoordinatori oleh Sekretaris Jenderal;
- Anggotanya terdiri dari seluruh Esselon I

### Tim Monitoring dan Evaluasi

- Dikoordinatori Ses Itjen;
- Anggotanya adalah seluruh Seditjen;

### Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran

- Dikoordinatori Kapus P3DN;
- Anggotanya adalah Direktur Sektor Industri

Dibentuk dengan dasar Keputusan Menperin No 796 tahun 2020





**TERIMA**

**KASIH**

LAYANAN KONSULTASI PUSAT P3DN

**0812-3644-6344**



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# REGULASI TERKAIT TIM P3DN

# PERATURAN PEMERINTAH NO 29 TAHUN 2018

## TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

### P3DN

dilakukan untuk Pemberdayaan Industri Dalam Negeri

Pasal 54

**Timnas P3DN**  
(diatur dalam Keppres 24/2018)

Pasal 73

**Tim P3DN**  
Dibentuk pada setiap K/LN,LPNK, SKPD

Pasal 74

**Pengawasan dan Sanksi**  
Sanksi Administratif & Finansial

Pasal 76

**Implementasi Sanksi**  
Lembaga Verifikasi, Pejabat PBJ dan Produsen/Penyedia

Pasal 106-110

### PDN wajib digunakan

K/LN,LPNK,SKPD

- APBN/APBD
- Pinjaman/Hibah

BUMN/BUMD/Swasta

- APBN/APBD
- Pola Kerjasama dengan Pemerintah (PPP)
- Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara

Pasal 57

### Penggunaan PDN

Kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan PBJ.

Pasal 58

### Pengadaan PDN

- pengadaan Barang;
- pengadaan Jasa; dan
- pengadaan gabungan Barang dan Jasa

Pasal 60

### TKDN

Wajib PDN bila terdapat PDN dengan jumlah nilai TKDN & BMP minimal 40% (dengan nilai TKDN minimal 25%)

Menteri Perindustrian menetapkan:

- Daftar Inventarisasi B/J PDN
- Batas minimal TKDN pada Industri tertentu

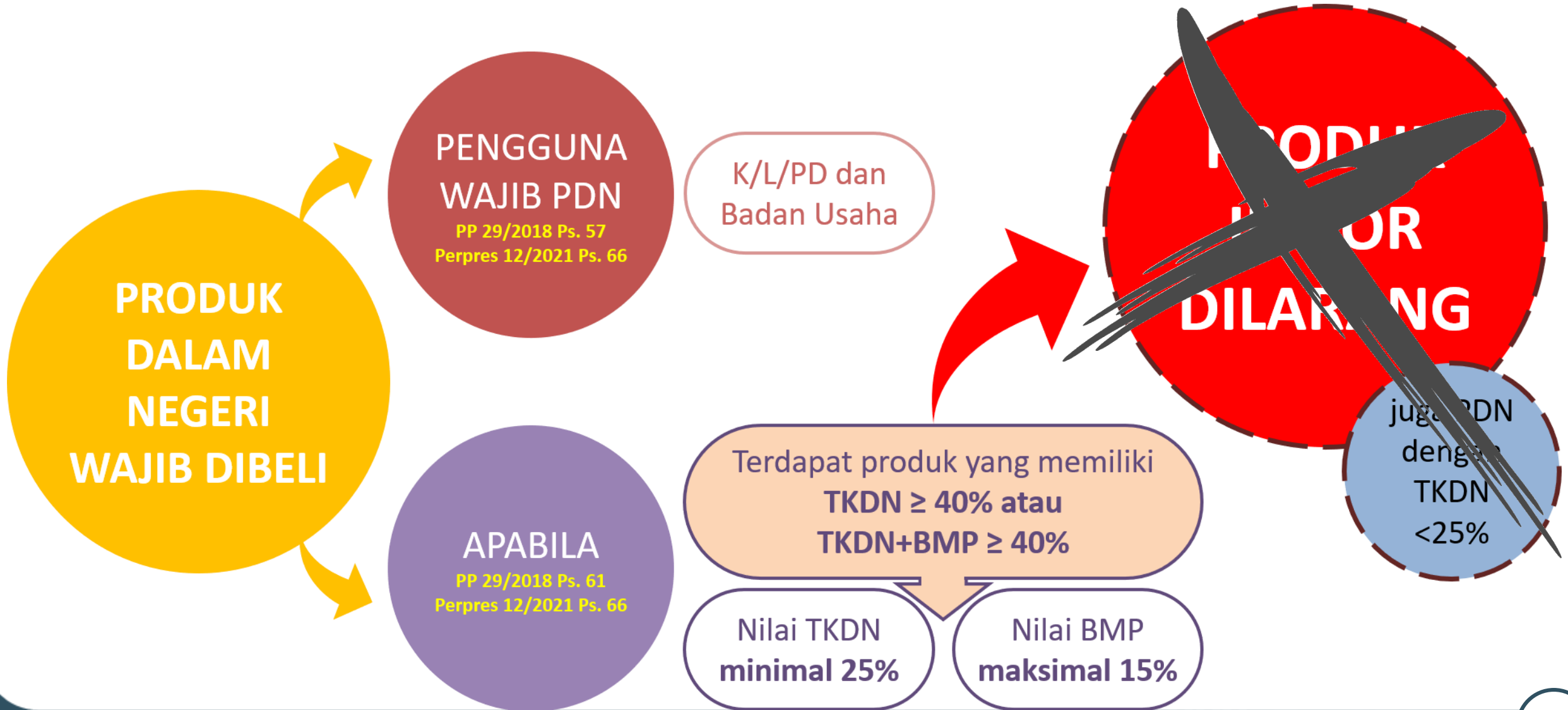
Pasal 61

### Fasilitas Pemerintah

- Preferensi harga atas PDN dengan nilai TKDN  $\geq$  25%
- Preferensi harga PDN Barang paling tinggi 25%
- Preferensi harga PDN Jasa Konstruksi oleh perusahaan DN paling tinggi 7,5% (di atas harga penawaran terendah perusahaan asing )

Pasal 64







# KEKUATAN INDUSTRI DALAM NEGERI

Kode Barang	Kelompok Barang	Jumlah Sertifikat		Nilai Capaian TKDN		
		Berlaku	Seluruhnya	<25%	25-40%	> 40%
1	Bahan Penunjang Pertanian	532	713	10	64	706
2	Mesin dan Peralatan Pertanian	282	499	19	149	197
3	Mesin dan Peralatan Pertambangan	22	47	8	19	19
4	Mesin dan Peralatan Migas	779	1643	294	598	511
5	Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling	35	81	2	27	9
6	Mesin dan Peralatan Pabrik	78	166	6	46	37
7	Bahan Bangunan/Konstruksi	1394	2079	47	163	1890
8	Logam dan Barang Logam	1362	2343	152	362	1449
9	Bahan Kimia dan Barang Kimia	1502	2963	348	726	1025
10	Peralatan Elektronika	505	731	159	396	315
11	Peralatan Kelistrikan	1801	4019	402	720	2630
12	Peralatan Telekomunikasi	677	1410	38	716	40
13	Alat Transport	85	213	2	49	34
14	Bahan dan Peralatan Kesehatan	2038	2422	222	2602	1236
15	Peralatan Laboratorium	4	8	0	3	1
16	Komputer dan Peralatan Kantor	78	240	23	33	169
17	Pakaian dan Perlengkapan Kerja	183	377	10	87	124
18	Peralatan Olahraga dan Pendidikan	99	208	3	41	81
19	Sarana Pertahanan	51	139	5	6	136
20	Barang Lainnya	3026	3973	96	753	3024
Total		<b>14.533</b>	<b>24.274</b>	<b>1.846</b>	<b>7.560</b>	<b>13.633</b>

Rata-rata sertifikat berlaku selama 3 tahun, jika sudah habis masa berlaku dapat disertifikasi ulang.

Sudah terdapat  
**13.633**  
Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN di atas 40%  
(Barang Wajib)  
dan  
**7.560**  
Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN antara 25-40%  
(akan menjadi wajib jika ditambah BMP mencapai minimal 40%)

Data tanggal:  
19 Maret 2022, 14:30 WIB

sumber data: [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id) ---- unduh file Excel: [http://tkdn.kemenperin.go.id/export\\_excel.php](http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php)

catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk

# DAFTAR INVENTARISASI B/J PRODUKSI DALAM NEGERI



P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

PUSAT P3DN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Gratis sertifikat

Fasilitasi Sertifikasi TKDN

Satu sertifikat yang difasilitasi, dapat memuat produk dengan jenis, bahan baku, dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
PT. Surveyor Indonesia  
Telp: 021-5265526 ext 403 dan 412  
CP: Ivan Richardo, Lebrina Eka Fitriani, Raden Andini Putri

PT. Sucofindo  
Telp 021-7983666 ext 2390  
CP: Jon Elpin Purba, Shasty Nurvidiani Rahim

Sertifikat TKDN  
Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

Rekapitulasi  
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan

Regulasi  
Peraturan mengenai P3DN dan TKDN

E-LAPOR  
Portal pengaduan terkait P3DN

**Rekapitulasi**  
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan

20. Kepulauan Riau

[Download Excel](#)

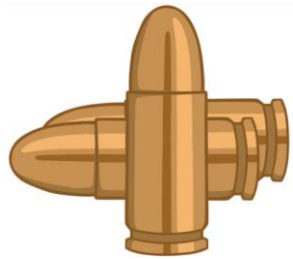
unduh rekapitulasi:  
[http://tkdn.kemenperin.go.id/export\\_excel.php](http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php)

**Sertifikat TKDN**  
Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



MENGUNDUH DATA TKDN DI SINI

# CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI ALAT PERTAHANAN



MUNISI

TKDN  
40,23 – 83,64%



GRANAT

TKDN  
41,27 – 62,04%



EMULSI

TKDN  
43,64 – 73,53%



SENJATA RINGAN

TKDN  
47,99 – 95,14%



PELINDUNG

TKDN  
25,05 – 25,07%



DETONATOR

TKDN  
13,84 - 23,73%

**Munisi** sudah terdapat 73 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Granat** sudah terdapat 8 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Emulsi** sudah terdapat 8 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Senjata Ringan** sudah terdapat 31 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Pelindung** sudah terdapat 3 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Detonator** sudah terdapat 4 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022



# CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI



**KEND. FUNGSI KHUSUS**

TKDN  
15,91 – 40,91%



**SEPEDA MOTOR R3**

TKDN  
22,29 – 28,12%



**PERAHU**

TKDN  
25,33 – 56,59%



**SEPEDA MOTOR LISTRIK**

TKDN  
25,58 – 46,73%



**GERBONG KA**

TKDN  
43,76 – 46,12%



**PESAWAT TERBANG**

TKDN  
44,69%

**Kendaraan Fungsi Khusus** sudah terdapat 9 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 2 produsen.

**Sepeda Motor Roda Tiga** sudah terdapat 6 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Perahu** sudah terdapat 9 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 3 produsen.

**Sepeda Motor Listrik** sudah terdapat 5 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 4 produsen.

**Kereta Api** sudah terdapat 2 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Pesawat Terbang** sudah terdapat 1 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022



# CONTOH KEMAMPUAN PRODUK BINAAN INDUSTRI AGRO

## TKDN 25,00-39,99%



2 produk

KUSEN

TKDN 25,01 – 37,32%



47 produk

FURNITUR

TKDN 15,86 – 39,87%



1 produk

KEMASAN

TKDN 31,33%



9 produk

PRODUK KERTAS

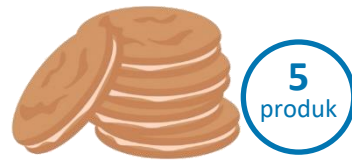
TKDN 25,01 – 37,36%



15 produk

MINUMAN

TKDN 25,06 – 38,44%



5 produk

MAKANAN

TKDN 29,89 – 39,21%

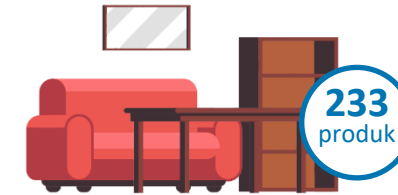
## TKDN ≥40,00%



25 produk

KUSEN

TKDN 42,51 – 97,45%



233 produk

FURNITUR

TKDN 40,12 – 97,02%



51 produk

KEMASAN

TKDN 48,54 – 97,98%



36 produk

PRODUK KERTAS

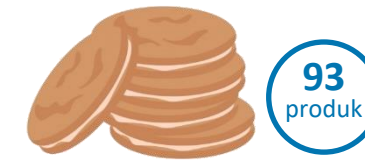
TKDN 40,54 – 98,59%



64 produk

MINUMAN

TKDN 44,29 – 97,90%



93 produk

MAKANAN

TKDN 44,40 – 99,87%

Informasi lebih lengkap mengenai produk dalam negeri dengan nilai TKDN dapat diakses melalui situs [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)

# CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI ALKES



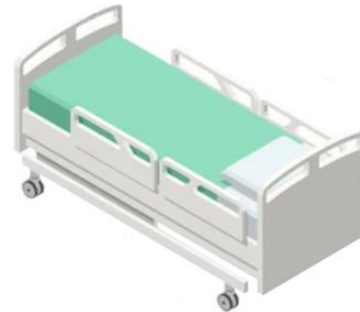
**VENTILATOR**

TKDN  
42,42 – 58,55%



**COVID-19 TEST KIT**

TKDN  
16,29 – 48,62%



**HOSPITAL BED**

TKDN  
10,10 – 57,95%

**Ventilator** terdapat 2 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 2 produsen.

**Covid-19 Test Kit** terdapat 14 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 7 produsen.

**Hospital Bed** terdapat 50 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 17 produsen.

**Surgical Apparel** terdapat 41 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 13 produsen.

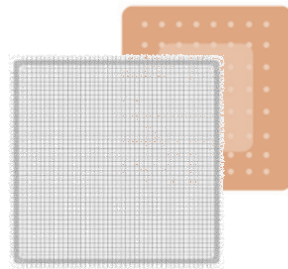
**Kasa/Perban** terdapat 45 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 6 produsen.

**Storage Container** terdapat 9 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 6 produsen.



**SURGICAL APPAREL**

TKDN  
20,44 – 90,49%



**KASA/PERBAN**

TKDN  
13,76 – 78,59%



**STORAGE CONTAINER**

TKDN  
25,16 – 83,70%

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022

# CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI ELEKTRONIK



SAKELAR RT

TKDN  
24,20 – 42,84%



KOMPOR

TKDN  
32,09 – 59,25%



PENDINGIN RUANGAN

TKDN  
9,61 – 40,49%



LAMPU

TKDN  
8,07 – 91,91%



TELEVISI

TKDN  
20,04 – 47,96%



SET TOP BOX

TKDN  
11,00 – 36,94%

**Sakelar Rumah Tangga** terdapat 6 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Kompor** terdapat 28 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 14 produsen.

**Pendingin Ruangan** terdapat 33 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 3 produsen.

**Lampu** terdapat 380 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 39 produsen.

**Televisi** terdapat 61 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 11 produsen.

**Set Top Box** terdapat 42 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 17 produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022

# CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI TIK



**NOTEBOOK**

TKDN  
14,41 – 37,64%



**ROUTER**

TKDN  
25,04 – 33,19%



**TELEPON SELULER**

TKDN  
25,02 – 48,98%

**Notebook** terdapat 17 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 7 produsen.

**Router** sudah terdapat 9 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 4 produsen.

**Telepon Seluler** sudah terdapat 551 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 34 produsen.

**Desktop PC** sudah terdapat 4 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 3 produsen.

**Komputer Tablet** sudah terdapat 58 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 14 produsen.

**Server** sudah terdapat 1 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.



**DESKTOP PC**

TKDN  
25,01 – 32,13%



**KOMPUTER TABLET**

TKDN  
30,00 – 37,60%



**SERVER**

TKDN  
26,76%

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022



# CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI BAHAN KONSTRUKSI



**ASPAL**

TKDN  
25,03 – 97,09%



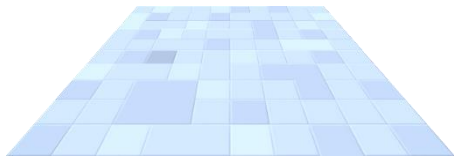
**BATA**

TKDN  
85,15 – 92,12%



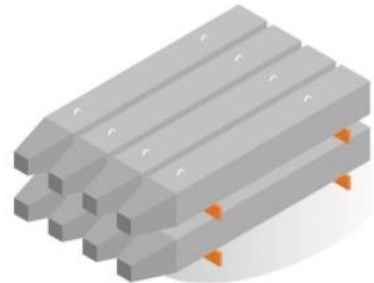
**CAT**

TKDN  
6,51 – 94,18%



**UBIN/KERAMIK**

TKDN  
47,03 – 99,29%



**TIANG PANCANG**

TKDN  
42,83 – 79,53%



**SEMEN-MORTAR**

TKDN  
25,16 – 97,01%

**Aspal** sudah terdapat 52 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 19 produsen.

**Bata** sudah terdapat 21 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 10 produsen.

**Cat** sudah terdapat 279 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 37 produsen.

**Ubin/Keramik** sudah terdapat 75 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 15 produsen.

**Tiang Pancang** sudah terdapat 94 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 9 produsen.

**Semen-Mortar** sudah terdapat 122 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 23 produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022





PAPAN TULIS

TKDN  
25,21 – 41,30%



MEJA

TKDN  
26,23 – 95,68%



KURSI

TKDN  
50,38 – 79,75%

**Papan Tulis** sudah terdapat empat produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh empat produsen.

**Meja** sudah terdapat tujuh produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh enam produsen.

**Kursi** sudah terdapat lima produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh empat produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022